



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MAGELANG
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUCHAMAD NUR AZIZ
2. Jabatan : WALIKOTA
3. NHK : 759883

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.420.704.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 2793 m2/270 m2 di KAB / KOTA PEMALANG, WARISAN Rp. 647.804.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/200 m2 di KAB / KOTA PEMALANG, WARISAN Rp. 772.900.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 607.000.000

1. MOTOR, HONDA NC11A3C Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, TOYOTA VELLFIRE 2.4VAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.044.034.142**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

Sub Total Rp. 3.071.738.142

III. HUTANG Rp. 909.533.065**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.162.205.077

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.